PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 4 November 2025

Nomor : 800.1.13.2/7536/204.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) Dokumen
Hal : Undangan

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(terlampir)

di
T E M P A T

Sehubungan dengan akan berakhirnya rangkaian proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan menyelenggarakan Rapat Pengelolaan Kepegawaian PPPK Paruh Waktu dan Penataan Jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 November 2025
Waktu : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Aula I Lantai 5 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
Pakaian : Yang berlaku saat itu

Menindaklanjuti dengal hal tersebut, dimohon Saudara menugaskan pejabat yang membidangi kepegawaian dan/atau yang membidangi hukum untuk hadir dalam kegiatan dimaksud. Adapun draft materi Perjanjian Kerja PPPK dapat dilihat melalui tautan **https://s.id/DraftPKPPPKParuhWaktu** untuk mendapat saran dan masukan bersama.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran I
Undangan
Nomor : 800.1.13.2/7536/204.2/2025
Tanggal : 4 November 2025

DAFTAR UNDANGAN PERANGKAT DAERAH

1	Badan Kepegawaian Daerah	1	orang
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	orang
3	Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro	2	orang
4	Badan Koordinasi Wilayah Jember	2	orang
5	Badan Koordinasi Wilayah Madiun	2	orang
6	Badan Koordinasi Wilayah Malang	2	orang
7	Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan	2	orang
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	orang
9	Badan Pendapatan Daerah	1	orang
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	orang
11	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	orang
12	Badan Penghubung Daerah Provinsi	2	orang
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	orang
14	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	orang
15	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1	orang
16	Biro Kesejahteraan Rakyat	1	orang
17	Biro Hukum	1	orang
18	Biro Perekonomian	1	orang
19	Biro Administrasi Pembangunan	1	orang
20	Biro Pengadaan Barang/Jasa	1	orang
21	Biro Organisasi	1	orang
22	Biro Umum	1	orang
23	Biro Administrasi Pimpinan	1	orang
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	orang
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	orang
26	Dinas Kehutanan	1	orang
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	orang
28	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	orang
29	Dinas Kesehatan	1	orang
a	Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	2	orang
b	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	1	orang
c	Kepala UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu	2	orang
d	Direktur RSUD Dr. Soetomo	1	orang
e	Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar	2	orang
f	Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	1	orang
g	Direktur RSUD Dr. Soedono Madiun	2	orang
h	Direktur RS Jiwa Menur	1	orang
i	Direktur RSUD Husada Prima	1	orang
j	Direktur RS Paru Jember	2	orang
k	Direktur RS Mata Masyarakat Jawa Timur	1	orang
l	Direktur RSUD Karsa Husada Batu	2	orang
m	Direktur RSUD Mohammad Noer Pamekasan	2	orang
n	Direktur RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur	2	orang
o	Direktur RSUD Sumberglagah	2	orang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

	p	Direktur RSUD Dungus	2	orang
	q	Direktur RSUD Daha Husada	2	orang
30		Dinas Komunikasi dan Informatika	1	orang
31		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	orang
32		Dinas Lingkungan Hidup	1	orang
33		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1	orang
34		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	1	orang
35		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	orang
36		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan	1	orang
37		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	orang
38		Dinas Pendidikan	1	orang
	a	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk	2	orang
	b	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun	2	orang
	c	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro	2	orang
	d	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bondowoso	2	orang
	e	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo	2	orang
	f	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Gresik	2	orang
	g	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember	2	orang
	h	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar	2	orang
	i	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang	2	orang
	j	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang	2	orang
	k	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Lamongan	2	orang
	l	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bangkalan	2	orang
	m	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi	2	orang
	n	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro	2	orang
	o	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung	2	orang
	p	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo	2	orang
	q	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pamekasan	2	orang
	r	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo	2	orang
	s	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto	2	orang
	t	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kab. Malang	2	orang
	u	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep	2	orang
	v	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan	2	orang
	w	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri	2	orang
	x	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sampang	2	orang
39		Dinas Perhubungan	1	orang
40		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	orang
41		Dinas Perkebunan	1	orang
42		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	orang
43		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	orang
44		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1	orang
45		Dinas Peternakan	1	orang
46		Dinas Sosial	1	orang
47		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	orang
48		Inspektorat Provinsi	1	orang
49		Satuan Polisi Pamong Praja	1	orang
50		Sekretariat DPRD	1	orang
		TOTAL UNDANGAN	132	orang

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran II
Undangan
Nomor : 800.1.13.2/7536/204.2/2025
Tanggal : 4 November 2025

SUSUNAN ACARA

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.00	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 2. Pembacaan Doa 3. Sambutan oleh Kepala Bidang P3DaSI	Panitia
09.00 – 09.45	**SESI I** 1. Materi I: Rencana Perubahan Peraturan Gubernur Jabatan Pelaksana 2. Tanya - jawab	Narasumber: Tim Perencanaan dan Formasi
09.45 – 10.30	**SESI II** 1. Materi II: Kelengkapan Dokumen Kepegawaian PPPK 2. Tanya - jawab	Narasumber: Tim Pengolahan Data dan Sistem Informasi ASN
10.30 – 13.00	**SESI III** 1. Materi III: Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kerja PPPK 2. Tanya - jawab	Narasumber: Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur
13.00	Penutupan	Panitia

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.